**Moh Ali Mahmud.** 2009. "Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2007". Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

Kata Kunci : Implementasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Program penaggulangan kemiskinan sebenarnya terus dilaksanakan pemerintah mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Kompensasi Pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), dan lain sebagainya. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. P2KP dimulai pada tahun 1999. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi keluarga miskin di Kecamatan Trangkil, bagaimana implementasi dan tingkat keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tahun 2007? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi keluarga miskin di Kecamatan Trangkil, implementasi dan tingkat keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tahun 2007.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin yang ada di Desa Trangkil yang berjumlah 698 kepala keluarga yang tersebar dalam VIII RW dan 51 RT. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Proporsional area random sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah masing-masing bagian terambil sampelnya secara acak yang semuanya berjumlah 87 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner, dokumentasi dan Wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif persentase.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi keluarga miskin di Kecamatan trangkil menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan adalah SLTA (40,2%), pekerjaan tetap sebagai pedagang (85,10 %). Sebelum keberadaan P2KP jumlah pendapatan rata-rata satu bulan kurang dari Rp. 500.000,00 (58,60%), jumlah pendapatan dari pekerjaan sampingan sebesar Rp. 250.000,00 (72,40%), biaya hidup < Rp. 500.000,00 (83,90%), jumlah tabungan dalam satu bulan < Rp. 100.000,00 (90.80%), tempat berobat di puskesmas (85,10%), status tempat tinggal di rumah sendiri (88,50%), jenis bangunan rumah permanent (88,5%), sumber air yang berasal dari sumur (97,70 %), dan menggunakan minyak tanah (93,10%). Setelah keberadaan P2KP terjadi peningkatan kualitas hidup keluarga miskin di Kecamatan Trangkil hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan rata-rata satu bulan antara Rp.500.000,00 -Rp. 800.000,00 (58,60%), jumlah pendapatan dari pekerjaan sampingan sebesar Rp. 250.000,00 (63,2%), biaya hidup < Rp.500.000,00 (86,20%), jumlah tabungan dalam satu bulan < Rp.100.000,00 (81.60%), tempat berobat di puskesmas (93,10%), status tempat tinggal di rumah sendiri (98,9%), jenis bangunan rumah permanent (95,4%), sumber air yang berasal dari sumur (96,60 %), dan menggunakan minyak tanah (92,00%). Implementasi program P2KP di Kecamatan Trangkil ditujukan untuk keluarga miskin yang tersebar di Desa Trangkil. Untuk Desa trangkil terdapat 1 BKM dan 245 KSM yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan program yang telah direncanakan. Dana Implementasi P2KP Kecamatan Trangkil merupakan dana bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Pati. Selain dana dari APBN dan APBD, juga terdapat dana swadaya masyarakat. Jumlah dana yang diajukan untuk pengaspalan jalan sebesar 145 juta hanya terealisasi sebesar 123,5 juta sedangkan untuk perbaikan rumah dana yang diajukan sebesar 72,5 juta terealisasi sebesar 47 juta. Keberhasilan P2KP di Kecamatan Trangkil dalam melaksanakan atau mengimplementasikan program pengaspalan jalan dan perbaikan rumah dipandang 100% berhasil menurut masyarakat di Kecamatan Trangkil. Ada beberapa alasan yang diuraikan oleh masyarakat diantaranya tingkat implementasi yang hampir merata di seluruh RW, pelaksanaan program yang begitu cepat sehingga sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama masyarakat miskin dan meningkatkan perekonomian desa.

Saran yang dapat peneliti kemukakan antara lain bagi pemerintah daerah, pelaksanaan P2KP hendaknya lebih ditingkatkan terutama masalah alokasi dana. Pemda Kabupaten Pati harus lebih mengusahakan agar dana APBD cepat dicairkan karena hal ini sangat menganggu pelaksanaan P2KP terutama dalam penyelesaian program pengaspalan jalan dan perbaikan rumha yang belum tuntas. Bagi BKM untuk dapat meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan P2KP, sehingga tujuan dari pelaksanaan P2KP dapat tercapai dengan maksimal. BKM juga harus bisa untuk memperjuangkan masyarakat miskin agar alokasi dana P2KP dapat ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan sehingga masyarakat miskin dapat memanfaatkannya. Bagi keluarga miskin untuk dapat mempergunakan sebaik-baiknya fasilitas jalan yang sudah ada di masing-masing desa untuk dapat menggerakan roda perekonomian sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat sehingga dapat keluar dari jeratan kemiskinan.